

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH INVESTASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

disusun dan diajukan oleh

**DESWANDI HARTEN**

**A11116323**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**SKRIPSI**

**PENGARUH INVESTASI DAN BELANJA DAERAH  
TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**DESWANDI HARTEN**

**A11116323**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar,

2022

Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE., M.Si.  
NIP. 19670817 199103 1 006

*rest WJH  
13/11-2022*  


Pembimbing II



Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.  
NIP. 19691215 199903 1 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

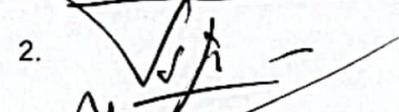
## PENGARUH INVESTASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**DESWANDI HARTEN**

**A11116323**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 06 Desember 2022 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan  
Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	
2.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si..	Sekretaris	
3.	Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®.	Anggota	
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.  
NIP. 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Deswandi Harten  
NIM : A11116323  
Jurusan/Program studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**“Pengaruh Investasi dan Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan”**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 Desember 2022

t pernyataan,  
  
Deswandi Harten

## PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul **“Pengaruh Investasi dan Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulisan skripsi ini berangkat dari keresahan akan masalah perekonomian di lingkungan sekitar, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis dengan jujur dan sepenuh hati oleh penulis dan sebagai wujud pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu Penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran dari pembaca terkait tulisan ini, agar skripsi ini yang merupakan sebuah karya penulis menjadi sebuah tulisan penelitian yang berguna bagi masyarakat luas yaitu mampu memberikan banyak pembelajaran serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung Penulis secara penuh. Untuk itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Allah SWT atas kehendak dan kemurahan-Nya memberikan hati yang tulus, pemikiran, energi pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Orang tua penulis, Ayahanda Hendri Ambo dan Ibunda Hardina yang dalam kesederhanaan dapat menjadi teladan bagi penulis dan berhasil menjadi orang tua yang selalu mendidik, memotivasi dengan penuh cinta kasih. Terimakasih atas segala kepercayaan, doa serta restu yang diberikan sehingga memudahkan penulis dalam menghadapi setiap tahap kehidupan.
3. Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Hamrullah, S.E., M.Si selaku penasihat akademik penulis. Terima kasih memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Agussalim, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr, Sultan Suhab, S.E., M.Si selaku pembimbing II. Terimakasih untuk setiap kritik,saran serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Madris, DPS., S.E., M.Si., CWM® dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® selaku dosen penguji, terimakasih untuk pertanyaan-pertanyaan serta kritik dan saran membangun yang disampaikan pada saat seminar proposal dan ujian skripsi, dari hal tersebut Penulis banyak memperoleh pengetahuan- pengetahuan baru.

7. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Wahyunur terima kasih untuk semua support dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu menyelesaikan Skripsi.
9. Teman-teman SPHERE terimakasih untuk setiap momen kebersamaan dan bantuan selama perkuliahan. Terimakasih atas persaudaraannya dan bantuan materi serta non materi yang diberikan kepada penulis sehingga bisa melalui proses perkuliahan dengan mudah dan sangat berkesan. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan mereka dalam proses perkuliahan.
10. Teman – teman Kabinet Himajie Bersatu. Terima kasih atas kerja keras, kerjasama dan amanahnya dalam menjalankan kepengurusan secara professional selama satu periode kepengurusan, sehingga penulis mendapatkan pengalaman terbaik dalam memimpin sebuah organisasi yakni HIMAJIE.
11. Kepada keluarga besar HIMAJIE FEB-UH yakni Kakak-kakak ESPADA, SPARK, PRIMES, ANTARES, dan juga adik-adik ERUDITE, LANTERN, GRIFFINS, RIVENDELL, dan SANCUARY terima kasih telah menciptakan momen-momen berharga dalam HIMAJIE yang akan selalu dikenang. Terimakasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban segala bentuk tanggung jawab dalam HIMAJIE. HIMAJIE Selalu di hati.
12. Kepada Sobat MEDKOMerz terimakasih untuk semua keceriaan dan

semangat kebersamaan dalam mewujudkan Medkom agar tetap mengudara.

13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 06 Desember 2022

Deswandi Harten

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH INVESTASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Deswandi Harten  
Agussalim  
Sultan Suhab

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Investasi dan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan menggunakan data *time series* dari tahun 2004 sampai tahun 2021 pada Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil empiris membuktikan bahwa variabel bebas Investasi dan Belanja Modal Provinsi berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara variabel bebas Belanja Modal Kabupaten/Kota berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Wilayah, Investasi, Belanja Daerah.

## ABSTRACT

### THE EFFECT OF INVESTMENT AND LOCAL EXPENDITURE ON REGIONAL INEQUALITY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Deswandi Harten  
Agussalim  
Sultan Suhab

*The purpose of this study is to analyze the effect of investment and local expenditure on regional inequality in South Sulawesi province. This research is a type of quantitative research using secondary data using time series data from 2004 to 2021 in South Sulawesi Province obtained from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) and the Investment Coordinating Board (BKPM). This study uses multiple linear regression analysis method. Empirical results prove that the independent variable Investment and variables Provincial Local Expenditure has a negative effect on Regional Inequality in South Sulawesi Province. While the independent District/City Local Expenditure has a positive effect on Regional Inequality in South Sulawesi Province during the study period.*

**Keywords :** *Regional Inequality, Investment, local expenditure.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
PRAKATA.....	iii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>1.3 Tujuan Masalah</b> .....	8
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II</b> .....	9
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	9
2.1.1 Ketimpangan Wilayah.....	9
2.1.2 Investasi .....	12
2.1.3 Belanja Modal.....	14
<b>2.2 Tinjauan Teoritis</b> .....	16
2.2.1 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Wilayah.....	16
2.2.2 Hubungan Belanja Modal dengan Ketimpangan Wilayah .....	18

2.3	Studi Empiris .....	20
2.4	Kerangka Konseptual Penelitian .....	21
2.5	Hipotesis Penelitian.....	22
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>23</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	23
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	23
3.3	Metode Analisis Data .....	23
3.3.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	24
3.3.2	Uji F-statistik .....	25
3.3.3	Uji t-statistik .....	25
3.4	Definisi Operasional.....	26
<b>B A B IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>28</b>
4.1	Perkembangan Variabel yang diteliti .....	28
4.1.1	Perkembangan Ketimpangan Wilayah .....	28
4.1.2	Perkembangan Investasi .....	29
4.1.3	Perkembangan Belanja Modal Provinsi .....	32
4.1.4	Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota.....	33
4.2	Hasil Estimasi Penelitian .....	36
4.3	Analisis dan Implikasi Hasil Penelitian.....	38
4.3.1	Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Wilayah .....	38
4.3.2	Pengaruh Belanja Modal Provinsi terhadap Ketimpangan Wilayah....	40
4.3.3	Pengaruh Belanja Daerah Kabupaten/Kota terhadap Ketimpangan Wilayah.....	41
5.1	Kesimpulan .....	44
5.2	Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>46</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Williamson Sulawesi Selatan .....	2
Tabel 1.2 Investasi Sulawesi Selatan.....	4
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal Sulawesi Selatan.....	6
Tabel 4.1 Investasi Sulawesi Selatan.....	31
Tabel 4.2 Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun .....	35
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi .....	36
Tabel 4.4 Kontribusi Belanja Modal Kabupaten/Kota Terhadap Total Belanja Modal se- Sulawesi Selatan.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	21
Gambar 4.1 Indeks Williamson Sulawesi Selatan .....	28
Gambar 4.2 Investasi Sulawesi Selatan .....	30
Gambar 4.3 Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan .....	33
Gambar 4.3 Belanja Modal Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada hakekatnya setiap negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Proses pembangunan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berlangsung secara kontinu akan tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan ekonomi. Pembangunan adalah suatu proses multi dimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial dan intitusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2007).

Dampak yang terjadi dari proses pembangunan ekonomi adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju. Menurut Sjafrizal (2012), Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan Produk Regional Domestik Bruto yang cukup tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi didalam Kawasan

Indonesia Timur (KTI). Namun tingginya PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan juga dibarengi dengan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu wilayah dapat menggunakan Indeks Williamson yang digunakan dalam studi *Jeffrey G Williamson* pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Indeks Williamson muncul sebagai pengguna awal dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah, Indeks Williamson memiliki pengertian dimana angka tersebut mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila Indeks Williamson mendekati 0 berarti ketimpangan pembangunan tersebut merata.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Williamson Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2020**

<b>TAHUN</b>	<b>INDEKS WILLIAMSON</b>
2011	0.561
2012	0.556
2013	0.548
2014	0.533
2015	0.516
2016	0.504
2017	0.505
2018	0.511
2019	0.522
2020	0.594

*Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2020 menunjukkan angka yang

cukup tinggi. Pada tahun 2011-2020 Indeks Williamson untuk Provinsi Sulawesi Selatan tergolong fluktuasi dikisaran 0,56-0,59 yang mengartikan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 2011-2020 terbilang cukup tinggi mengingat angka indeks yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin lebar. Perkembangan indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan yang kurang signifikan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya investasi dan belanja daerah.

Alokasi investasi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu mengakibatkan investasi menjadi tidak merata pada suatu wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan investor lebih memilih menanamkan modalnya di wilayah yang berfasilitas baik, struktur jalannya baik dan juga pendidikannya jauh lebih baik dari wilayah yang masih terbelakang. Hal yang demikian membuat wilayah tersebut lebih berpotensi untuk mendapatkan investor dan bahkan wilayah yang tidak mendapat penanaman modal akan tertinggal dari wilayah lain.

Jhingan (2014) menjelaskan terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah, dimana salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan suatu wilayah adalah investasi. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Sedangkan, wilayah terbelakang lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal. Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Menurut Sunariyah (2014) investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Penanaman modal yang dilaksanakan dengan tepat dan dalam jangka waktu panjang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pembangunan baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi swasta mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan data investasi PMDN dan PMA Sulawesi Selatan tahun 2011-2020 melalui tabel 1.3 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Investasi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020**

<b>Tahun</b>	<b>PMDN (Miliar Rupiah)</b>	<b>PMA (Juta US\$)</b>
2011	3.986,3	89,6
2012	2.318,9	582,6
2013	921	462,8
2014	4.949,6	280,9
2015	9.215,3	233,3
2016	3.334,6	372,5
2017	1.969,4	712,8
2018	3.275,9	617,2
2019	5.672,6	302,6
2020	9.142	236,1
Total	44.785,6	3.890,4

*Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (data diolah)*

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa investasi di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi. Investasi PMDN terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 921 miliar rupiah, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 9.215,3 miliar rupiah. Begitupula dengan investasi PMA yang dimana terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 89,6 juta US\$, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 712,8 juta US\$.

Intervensi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut Dhyatmika dan Amanti (2013), peranan pemerintah dapat dilihat dari belanja daerah yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Belanja daerah dapat meningkatkan perekonomian melalui program atau kegiatan yang menunjang produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Belanja daerah dapat dilihat dari realisasi belanja daerah yang terbagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kemudian, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/Kota, dan belanja tidak terduga.

Dalam menjalankan aktivitasnya, pemerintah menggunakan instrumen belanja yang tertuang dalam APBN dan APBD untuk mendanai semua kegiatannya. Sebagian

dari belanja pemerintah tersebut dialokasikan dalam pos belanja modal. Belanja modal pemerintah merupakan permintaan atas output perekonomian dalam rangka pembentukan aset yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Oleh karena itu belanja modal menjadi investasi pemerintah pada sektor publik yang sangat penting untuk mendorong perekonomian dan pemerataan pendapatan karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Untuk melihat Belanja Modal yang ada didalam Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat dengan Belanja Modal Provinsi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan Belanja Modal Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh pemerintah masing-masing kabupaten atau kota dalam provinsi tersebut. Kedua-nya diharapkan mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020 (Ribu Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal Provinsi</b>	<b>Belanja Modal Kabupaten/Kota</b>
2011	467,685,317	3,269,583,854
2012	377,151,913	3,102,882,461
2013	490,213,949	3,767,240,395
2014	676,237,209	4,835,031,689
2015	849,305,058	6,453,940,083
2016	856,863,744	8,620,893,184
2017	1,051,187,331	7,584,551,808
2018	1,081,805,775	6,750,381,344
2019	969,490,769	6,854,962,306
2020	1,195,023,370	5,593,673,289

*Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 1.3 Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011–2020 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2012 dan 2019, pada tahun 2012 terjadi

penurunan sebesar 90.533.404 ribu rupiah dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 112.315.006 ribu rupiah. Adapun Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2022 terus mengalami fluktuasi. Belanja Modal Kabupaten/Kota tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka 8.620.893.184 ribu rupiah.

Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan yang terus meningkat mengindikasikan bahwa peran pemerintah untuk mendorong perekonomian juga cukup besar. Dengan adanya belanja daerah, maka proses pembangunan akan berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Investasi dan Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah Belanja Modal Provinsi berpengaruh terhadap Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Belanja Modal Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal Provinsi terhadap Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal Kabupaten/Kota terhadap Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ragam penelitian Pengaruh Investasi dan Belanja daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sulawesi Selatan dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan terkait Pengaruh Investasi dan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sulawesi Selatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan mengetahui adanya Pengaruh Investasi dan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Ketimpangan Wilayah**

Sjafrizal (2012) mengatakan bahwa penyebab ketimpangan ekonomi antarwilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan daerah yang bersangkutan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah, yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan *spread effect* dan *backwash effect* sebagai pengaruh penjaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* (dampak sebar) diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (*favourable effect*), mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Backwash effect* (dampak balik) diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian (*infavourable effect*), mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti dan mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti.

Menurut Myrdal (1957), terjadinya ketimpangan regional karena besarnya pengaruh dari *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara - negara terbelakang. Perpindahan modal akan meningkatkan ketimpangan regional, peningkatan permintaan ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010).

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. Ada kalanya masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada daerah bersangkutan. Akan tetapi ada pula masyarakat merasakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin.

Perlu diingat disini bahwa, berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antar wilayah. Hal yang dipersoalkan disini bukan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, tetapi adalah perbedaan antar daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara. Jeffrey G. Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Williamson menggunakan Williamson Index (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Formulasi Indeks Williamson secara *statistic* sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \frac{P_i}{P}}}{Y}$$

Keterangan:

$Y_i$  = Pendapatan per kapita daerah  $i$

$Y$  = Pendapatan per kapita seluruh daerah  $i$

$P_i$  = Jumlah penduduk daerah  $i$

$P$  = Jumlah penduduk seluruh daerah  $i$

Angka Indeks Williamson mempunyai hasil  $1 > IW > 0$  yang mengartikan semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau semakin merata dan sebaliknya angka yang semakin besar atau mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Ada tiga kriteria dalam perhitungan indeks Williamson ini, yaitu indeks jika indeks Williamson menunjukkan:

- Angka 0,0 sampai 0,2 maka ketidak merataanya rendah.
- Angka 0,21 sampai 0,35 maka ketidak merataanya sedang.
- Angka  $> 0,35$  maka ketidak merataanya tinggi.

### **2.1.2 Investasi**

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan, hanya daerah-daerah yang dinilai mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yakni sebagai berikut:

- a. Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi.
- b. Investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan.
- c. Investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Menurut Sultan dan Jamzani (2010) realita di negara berkembang dalam pembangunan terdapat kemajuan yang tidak merata antar daerah atau dengan kata lain terdapat tingkatan ketimpangan antar daerah. Seperti yang terjadi di Indonesia, secara geografis wilayah terdiri atas kepulauan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah pusat pemerintah dan pertumbuhan. Tidak meratanya tingkatan pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah disebabkan oleh:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
2. Alokasi investasi yang tidak merata.
3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) antar wilayah.
5. Perbedaan kondisi geografis antar wilayah.
6. Kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Teori Harrod-Domar (dalam Boediono, 1985) adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan penawaran agregat. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran

investasi tidak hanya mempunyai pengaruh (lewat proses *multiplier*) terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, investasi stok kapital misalnya, pabrik-pabrik, jalan-jalan, dan sebagainya.

### **2.1.3 Belanja Modal**

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Halim, 2012). Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dalam sektor pelayanan akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah.

Menurut Rostow dan Musgrave pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. (Mangkoesoebroto,2000)

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, bersamaan dengan itu peran investasi swasta juga meningkat. Tetapi besarnya pengeluaran pemerintah pada tahap menengah ini dikarenakan oleh pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan dari perkembangan ekonomi itu sendiri sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik, selain itu juga banyaknya eksternalitas negatif yang timbul dan menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Pada tahap lanjut Rostow berpendapat bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial. Sementara menurut Musgrave, dalam suatu proses pembangunan rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional semakin mengecil.

Konsep Pengeluaran Pemerintah menurut Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. "Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa  $Y = C + I + G + X - M$ . Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G

melambangkan pengeluaran pemerintah”. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui berapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 2007).

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Wilayah**

Myrdal mengemukakan bahwa perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2014).

Menurut Myrdal dalam Jhingan (2014) investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

Dalam teori Investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1997), pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod- Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai

pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Harrod-Domar menyatakan untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal. Berdasarkan teori tersebut yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa bertambahnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut akan meningkat.

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan atau dari ekonomi pertanian (tradisional) ke ekonomi industri (modern). Pada awal proses pembangunan ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan yakni pada sektor industri sudah dapat menyerap sebagian tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, ketimpangan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi (Todaro, 2013).

### **2.2.2 Hubungan Belanja Modal dengan Ketimpangan Wilayah**

Peran pemerintah dalam mengatur pengeluarannya merupakan instrument penting untuk mengendalikan perekonomian. Banyak ekonom berpendapat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan endogen (Barro, 1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Salah satu pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sabir, 2015).

Sedangkan menurut Keynes pengeluaran pemerintah adalah salah satu permintaan agregat yang dimana jika permintaan agregat meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana yang akan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan atau dari ekonomi pertanian (tradisional) ke ekonomi

industri (modern). Pada awal proses pembangunan ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan yakni pada sektor industri sudah dapat menyerap sebagian tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, ketimpangan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi (Todaro, 2013).

Belanja modal juga merupakan investasi pemerintah karena barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Apabila barang modal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, maka belanja modal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dalam jangka panjang pula. Sedangkan untuk *output* belanja modal dalam bentuk barang publik dapat digunakan untuk mendorong efisiensi produktivitas, perdagangan, dan memperlancar akses pemerataan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan mendorong perekonomian ke arah penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat memberikan penghasilan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka ketimpangan wilayah juga akan turun.

Sjafrizal (2008) mengatakan bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-

pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berskala kecil.

### **2.3 Studi Empiris**

Muhammad Ridho (2021) meneliti “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi Di Pulau Sumatera”. Dengan hasil penelitian variabel belanja daerah, pengangguran, investasi dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Di sisi lain, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Muhammad Haikal (2020) meneliti “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Utara”. Dengan hasil PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

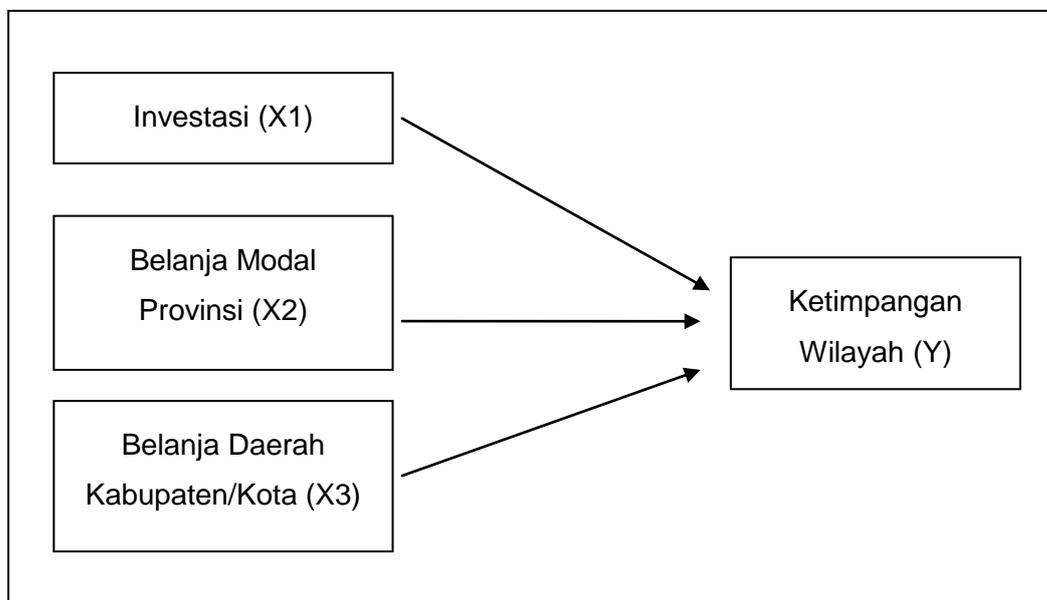
Ni Putu Valentiana Shanty (2015) meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali” dengan hasil Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi

Pendapatan, sedangkan dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Heny Sucihati (2014) meneliti “Pengaruh kenaikan investasi swasta dan Pengeluaran pemerintah daerah terhadap Ketimpangan pembangunan di Kalimantan barat” dengan hasil penelitian yaitu pengaruh yang signifikan antara investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat hanya terbukti pada variabel pengeluaran pemerintah.

## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu Ketimpangan Wilayah yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah: Investasi (X1) dan Belanja daerah yang terbagi dalam Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan (X2) dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan. Berdasarkan hubungan antar variabel Pada sub bab 2.2 maka gambar 2.1 menunjukkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Untuk melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Investasi berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Belanja Modal Provinsi berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Belanja Modal Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.